

## BUPATI KOTIM PANTAU KEBERLANJUTAN PROGRAM MBG



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor memantau langsung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menyerap aspirasi dari para murid selaku penerima manfaat dari program tersebut.

“Hari ini saya memantau langsung pelaksanaan Program MBG yang merupakan program dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto. Alhamdulillah, saya lihat pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan mendapat respons positif,” kata Halikinnor di Sampit, Rabu.

Ada dua sekolah yang ia sambangi dalam kegiatan ini, yakni SMP Muhammadiyah Sampit dan TK Pembina yang berlokasi di Jalan Achmad Yani, Sampit. Dalam kegiatan ini ia turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan serta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan dan lainnya.

Kegiatan ini bisa dikatakan sebagai evaluasi kecil-kecilan yang ia lakukan setelah selama kurang lebih dua bulan Program MBG itu dilaksanakan di Kotim, tepatnya dimulai pada 24 Februari 2024 lalu.

Halikinnor menyebutkan berdasarkan pantauannya, Program MBG pada dua sekolah tersebut telah berjalan dengan baik. Makanan yang disajikan sudah memenuhi standar gizi dan menuanya berganti setiap 10 hari, sehingga para murid tidak cepat bosan.

Respons para murid terhadap program ini pun sangat baik. Para murid mengaku senang karena selain mendapat makanan gratis, mereka bisa menghemat uang saku karena tidak perlu lagi membeli jajanan atau makan siang di sekolah.

Di sisi lain, orang tua juga juga merasakan manfaat dari program ini, khususnya bagi orang tua di tingkat pendidikan TK karena tidak perlu repot menyiapkan bekal untuk anaknya sekolah.

“Jadi orang tua bisa terbantu secara ekonomi karena tidak perlu menyiapkan bekal dan anak-anak pun bisa belajar untuk menabung karena uang sakunya tidak digunakan untuk jajan di sekolah,” ujarnya.

Kendati, ada pula keluhan yang disampaikan para pelajar terkait buah yang terdapat dalam menu makanan bergizi gratis. Buah pisang yang paling sering digunakan untuk pelengkap terkadang terlalu matang atau sebaliknya agak mentah.

Kondisi seperti ini terbilang wajar, karena memang biasanya dalam satu tandan pisang belum tentu semua matang bersamaan.

Namun, menanggapi keluhan itu pihaknya berkonsultasi dengan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga buah pisang bisa diganti atau diselingi dengan buah lainnya.

“Kami tadi tanya ke ahli gizi, apakah harus menggunakan buah pisang dan katanya tidak juga, sehingga nanti bisa dilakukan penyesuaian,” ujarnya.

Terlepas dari itu, secara garis besar pelaksanaan Program MBG ini merupakan program yang bagus. Ia pun berharap program ini dapat berdampak positif dalam mengatasi permasalahan stunting dan meningkatkan kecerdasan anak bangsa, khususnya di Kotim.

Hal ini sejalan dengan misi Presiden Republik Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi kesehatan maupun kecerdasan, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Disamping itu, program ini juga memberikan manfaat bagi perekonomian daerah dengan melibatkan petani dan peternak lokal sebagai pemasok bahan makanan, seperti sayuran, tempe dan ayam sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

“Maka dari itu, Pemkab Kotim sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat khususnya Presiden Prabowo Subianto yang telah memprogramkan makanan bergizi gratis ini,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai masih sedikit sekolah yang mendapat manfaat Program MBG di Kotim, Halikinnor menerangkan program ini merupakan program pusat sesuai arahan Presiden.

Dalam arahan itu semua sekolah akan mendapatkan bagian masing-masing, namun secara bertahap karena menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Pemkab Kotim pada dasarnya mendukung program ini, tetapi tidak berperan sebagai pengambil keputusan.

Ia juga berharap dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan vendor serta dukungan masyarakat maka pemerataan Program MBG di Kotim bisa segera terwujud.

“Kita doakan saja agar vendornya bisa segera bertambah dengan begitu otomatis jumlah sasaran pun akan bertambah, karena jumlah sasaran ini menyesuaikan dengan kapasitas vendor,” pungkasnya.

Seorang murid SMP Muhammadiyah Sampit, Faizal Zaki Pratama menganggap Program MBG sangat membantu bagi kalangan murid, terutama bagi murid yang mengalami kekurangan gizi atau terkendala ekonomi sehingga tidak memiliki uang saku atau membawa bekal ke sekolah.

“Program ini sudah bagus, bisa membantu kawan-kawan yang kekurangan gizi atau tidak bawa bekal. Menunya juga sudah pas, ada karbohidrat, protein, zat besi dan vitamin. Menunya juga gonta-ganti jadi tidak bosan. Harapannya program ini bisa berjalan terus,” demikian Zaki.

### **Sumber Berita:**

1. <http://kalteng.antaranews.com/berita/754533/bupati-kotim-pantau-keberlanjutan-program-mbg>, Rabu, 16 April 2025.
2. [https://seputarborneo.com/news/15566\\_Bupati\\_Kotim\\_Pantau\\_Pelaksanaan\\_Program\\_MBG\\_di\\_TK\\_Negeri\\_Pembina\\_dan\\_SMP\\_Muhammadiyah\\_Sampit.html](https://seputarborneo.com/news/15566_Bupati_Kotim_Pantau_Pelaksanaan_Program_MBG_di_TK_Negeri_Pembina_dan_SMP_Muhammadiyah_Sampit.html), Rabu, 16 April 2025.

### **Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 angka 3).

Dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
- b. anak usia di bawah lima tahun;
- c. ibu hamil; dan
- d. ibu menyusui.

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 52).